

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas suatu laporan keuangan dilihat dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu syarat normatif sebagaimana telah disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yaitu andal (*reliability*), relevan (*relevance*), dapat dipahami (*understandability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi terkait laporan keuangan tersebut memenuhi kriteria karakteristik kualitatif seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dipenuhi oleh pemerintah, maka pemerintah akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Bukannya hanya pada pemerintah daerah saja yang diharapkan untuk dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah desa juga dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berkualitas yaitu dalam hal laporan keuangannya. Seperti laporan keuangan daerah, laporan keuangan desa juga harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mempublikasikannya kepada masyarakat. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa: 2012).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dengan dilaksanakannya dua hal tersebut yaitu memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan akses atau kemudahan

kepada masyarakat terkait informasi laporan keuangan dapat mewujudkan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat yang harus dipenuhi yaitu dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Salah satu pilar dari tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mengharuskan agar penyajian laporan keuangan tersebut disajikan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa: 2012).

Dalam pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri dengan berdasarkan pada demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota/Kabupaten memberikan bantuan dana salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud nyata pemerintah daerah dalam hal membantu dan meningkatkan

partisipasi pemerintah desa dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintah desa dengan memberikan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambutan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang mempunyai jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar ke 2. Berikut ini merupakan pagu anggaran Alokasi Dana Desa untuk tahun 2016-2017 di Kecamatan Rambutan:

Tabel 1.1
Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Desa	Alokasi Dana Desa	
		2016	2017
1	Kebon Sahang	138.150.000	189.578.828
2	Pulau Parang	130.950.000	178.781.928
3	Siju	152.550.000	206.054.546
4	Tanah Lembak	117.750.000	166.640.284
5	Parit	123.750.000	173.563.715
6	Pelaju	124.950.000	175.345.225
7	Durian Gadis	116.550.000	166.134.946
8	Sungai Dua	186.750.000	248.543.672
9	Tanjung Kerang	161.550.000	245.333.626
10	Suka Pindah	150.150.000	206.263.418
11	Tanjung Merbu	145.350.000	199.632.543
12	Desa Baru	120.150.000	163.906.249
13	Gelebak Dalam	139.350.000	188.303.880
14	Sako	137.550.000	186.778.557
15	Pangkalan Gelebak	159.750.000	218.777.487
16	Menten	135.750.000	184.982.184
17	Sungai Kedukan	205.950.000	275.349.121
18	Sungai Pinang	214.350.000	287.033.155
19	Rambutan	166.950.000	257.982.622
	TOTAL	2.828.250.000	3.918.985.986

Sumber: Kantor Kecamatan Rambutan

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa untuk tahun 2016 dan 2017 menggunakan persentase yang sama sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin No.35 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa

Dalam Kabupaten Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2017. Pembagian Alokasi Dana Desa tersebut adalah untuk Operasional Pemerintah Desa seperti gaji perangkat desa dan kepala desa sebesar 52%, Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebesar 25%, Operasional PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sebesar 10%, Operasional Posyandu sebesar 7% dan untuk Operasional Karang Taruna, Limas, dan Adat sebesar 3%. Kenaikan jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rambutan dalam dua tahun tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penyaluran Alokasi Dana Desa terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Tahap I pada bulan Februari-Maret sebesar 40%
- b. Tahap II pada bulan Juni-Juli sebesar 40% dan
- c. Tahap III pada bulan September-Oktober sebesar 20%

Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas, jika aparatur atau perangkat desa itu sendiri masih belum memiliki pemahaman yang cukup dalam hal pengelolaan keuangan desa. Salah satu faktor tersebut adalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai sehingga berdampak pada lemahnya pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa, seperti dalam hal pelaporan untuk pertanggung jawaban yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi tidak terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa yang baik. Oleh karena itu, menyajikan laporan keuangan desa yang berkualitas sangat diperlukan agar terwujudnya akuntabilitas serta akses yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Melihat fenomena yang terjadi, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan salah satunya untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Aksesibilitas secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah. Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan maka, penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Peneliti hanya akan membahas pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di desa yang berada pada wilayah Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.
3. Data yang digunakan pada tahun 2016-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
2. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Aksesibilitas secara parsial pada Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang saran atau masukan bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.
2. Bagi teroris, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.